

ABSTRAK

Aqshal Kiswa Fadillah, 1218010025, 2025: Implementasi Diseminasi Informasi Pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Diseminasi informasi merupakan bagian penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di instansi pemerintahan. Namun, implementasi diseminasi informasi pada pelayanan permohonan informasi publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat belum berjalan optimal, terutama pada faktor komunikasi dan sumber daya. Ketimpangan jumlah permohonan yang dominan pada kategori pengajuan bibit menunjukkan bahwa informasi layanan lainnya belum tersampaikan secara merata. Sementara itu, keterbatasan staf khusus, belum tersedianya ruang layanan, dan kurangnya pelatihan teknis menjadi tantangan utama dalam aspek sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi diseminasi informasi pada pelayanan permohonan informasi publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat. Khususnya dalam mengidentifikasi sejauh mana proses tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mengkaji empat dimensi penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini menelaah bagaimana keempat elemen tersebut saling memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam proses diseminasi informasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan orientasi awal, kategorisasi, koneksi, tematisasi, dan pencandraan ulang, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diseminasi informasi telah berlangsung cukup baik pada dimensi disposisi dan struktur birokrasi melalui SOP dan koordinasi lintas bidang. Namun, hambatan masih ditemukan pada komunikasi dan sumber daya, seperti belum meratanya penyebaran informasi dan keterbatasan tenaga serta fasilitas pendukung. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan teknis, penguatan media digital, serta penyediaan fasilitas dan personel khusus menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan diseminasi informasi.

Kata Kunci: Diseminasi Informasi, Layanan Informasi Publik, Implementasi Kebijakan